

DINAMIKA STRUKTUR PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERDESAAN DI DESA SAWAH BERBASIS PADI

Erma Suryani dan Supriyati

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik (2014a), pendapatan rumah tangga adalah seluruh penghasilan atau penerimaan berupa uang atau barang dari semua anggota rumah tangga yang diperoleh, baik yang berupa upah/gaji, pendapatan dari usaha rumah tangga, pendapatan lainnya, dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer). Dengan kata lain, pendapatan rumah tangga merupakan balas jasa faktor produksi tenaga kerja, balas jasa kapital, maupun pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer). Sumber pendapatan rumah tangga digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pendapatan sektor pertanian dan nonpertanian. Sumber pendapatan dari sektor pertanian terdiri atas pendapatan dari usaha tani, ternak, buruh petani, menyewakan lahan, dan bagi hasil. Sumber pendapatan dari sektor nonpertanian dibedakan menjadi pendapatan dari industri rumah tangga, perdagangan, pegawai, jasa, buruh nonpertanian serta buruh subsektor pertanian lainnya (Sajogyo, 1990). Pendapatan rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan ekonomi secara langsung, di samping pangsa pengeluaran pangan, nilai tukar petani, kemiskinan, dan kecukupan kalori (Purwoto *et al.*, 2011).

Berdasarkan Survei Pendapatan Rumah Tangga, dalam periode 2004–2013 rata-rata pendapatan rumah tangga usaha pertanian meningkat, dari Rp4,105 juta menjadi Rp12,413 juta atau meningkat sekitar 200% (BPS, 2014b). Dilihat dari strukturnya, pendapatan dari usaha pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan rumah tangga, yaitu 44% pada 2003 dan 46% pada tahun 2013. Dalam periode tersebut, kontribusi pendapatan dari berburuh di sektor pertanian dan usaha di luar sektor pertanian cenderung menurun, sementara pendapatan berburuh di luar sektor pertanian cenderung meningkat.

Dari sumber yang sama, struktur pendapatan dari usaha pertanian dalam periode 2004–2013 dapat disampaikan sebagai berikut: (1) kontribusi pendapatan terbesar adalah dari tanaman perkebunan (sekitar 33%), tidak terjadi pergeseran, bahkan kontribusi cenderung meningkat; (2) kontribusi pendapatan dari tanaman padi menduduki peringkat kedua, yaitu sekitar 25%; (3) kontribusi pendapatan dari tanaman hortikultura cenderung menurun, dan kontribusinya sekitar 10%; dan (4) kontribusi pendapatan dari tanaman palawija relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan dari tanaman padi, hanya sekitar 7% dan mengalami kecenderungan menurun.

Hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) menunjukkan bahwa usaha pertanian di Indonesia didominasi oleh jenis usaha rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian berbadan hukum atau jenis usaha pertanian lainnya. Jumlah

rumah tangga usaha pertanian di Indonesia hasil ST2013 tercatat sebanyak 26,14 juta rumah tangga, menurun sebesar 16,32% dari hasil Sensus Pertanian 2003 (ST2003) yang tercatat sebanyak 31,23 juta rumah tangga. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu sebanyak 4,98 juta rumah tangga, sedangkan Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak (Badan Pusat Statistik, 2013, 2014b). Usaha pertanian di tingkat rumah tangga yang banyak diusahakan adalah tanaman pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan. Jumlah rumah tangga petani padi paling dominan dibandingkan dengan rumah tangga lainnya, yaitu sekitar 14 juta. Pada periode 2003–2013, terjadi penurunan jumlah rumah tangga petani padi sebesar 0,41%. Dengan demikian, menjadi penting untuk mengkaji dinamika di perdesaaan sawah berbasis padi. Secara khusus tujuan penulisan makalah ini adalah (1) mengkaji dinamika pendapatan rumah tangga (nominal dan riil); (2) mengkaji struktur pendapatan rumah tangga; dan (3) mengkaji distribusi pendapatan rumah tangga.

METODE ANALISIS

Data yang digunakan dalam analisis adalah data rumah tangga yang bersumber dari data Patanas pada tipe desa sawah berbasis padi tahun 2007 dan 2010 di lima provinsi sentra produksi padi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, yang mencakup 14 desa di 14 kabupaten. Sebaran desa contoh Patanas dengan tipe desa sawah berbasis padi ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Desa Contoh Patanas Berbasis Padi Sawah Menurut Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, 2007 dan 2010

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1.	Sumut	Batu Bara	Lima Puluh	Kwala Gunung
		Serdang Bedagai	Perbaungan	Lidah Tanah
2.	Jabar	Indramayu	Lelea	Tugu
		Subang	Cipunegara	Simpar
		Karawang	Kutawaluya	Sindangsari
3.	Jateng	Cilacap	Majenang	Padangsari
		Klaten	Karang Dowo	Demangan
		Sragen	Karang Malang	Mojorejo
		Pati	Jakenan	Tambah Mulyo
3.	Jatim	Jember	Jombang	Padomasan
		Banyuwangi	Genteng	Kaligundo
		Lamongan	Sekaran	Sungegeneng
4.	Sulsel	Sidrap	Watang Pulu	Carawali
		Luwu	Lamasi	Salujambu

Sumber: Irawan *et al.* (2007), Susilowati *et al.* (2010)

Pada tulisan ini dilakukan agregasi menurut provinsi, yaitu Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sumatera Utara (Sumut), dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Responden penelitian Patanas 2007 adalah rumah tangga pemilik lahan dan penggarap usaha tani padi sebanyak 25 rumah tangga pada masing-masing desa. Pada Penelitian Patanas 2010, responden diperluas tidak hanya petani, namun ditambah dengan buruh tani, usaha nonpertanian, dan buruh nontani. Dengan demikian, jumlah responden per desa sebanyak 40 rumah tangga, yang terdiri dari 4 kelompok menurut jenis pekerjaan utama, yaitu (a) petani, (b) buruh tani, (c) usaha nonpertanian, dan (d) buruh nonpertanian.

Analisis pendapatan rumah tangga ditujukan untuk memahami besarnya tingkat pendapatan rumah tangga, distribusi pendapatan rumah tangga, dan struktur pendapatan rumah tangga. Peningkatan pendapatan rumah tangga antarwaktu dapat digunakan sebagai indikator meningkatnya daya beli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Analisis struktur pendapatan rumah tangga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar lapangan kerja dan usaha pertanian mampu berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Distribusi pendapatan rumah tangga yang diukur dengan indeks Gini dapat digunakan sebagai indikator ketimpangan pendapatan rumah tangga sebagai akibat ketidakmerataan aksesibilitas rumah tangga terhadap sumber daya ekonomi.

Metode analisis untuk mengetahui dinamika pendapatan secara nominal adalah dengan menghitung pertumbuhannya dengan rumus (1), sementara untuk mengetahui dinamika pendapatan riil dilakukan dengan mendeflasi pendapatan nominal dengan harga beras. Harga beras yang digunakan sebagai deflator adalah modus harga beras di masing-masing desa.

$$R = (Y_t - Y_{t-1}) / Y_{t-1} \times 100\% \quad (1)$$

di mana: R = pertumbuhan periode awal dan akhir (%)

Y_t = pendapatan tahun akhir

Y_{t-1} = pendapatan tahun awal

Untuk menghitung parameter struktur pendapatan rumah tangga menurut sumbernya digunakan rumus sebagai berikut:

$$P_m = \left[\sum_{i=1}^n X_{ki} \right] / \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m X_{ij} \right] \times 100\% \quad (2)$$

di mana: P_m = pangsa sumber pendapatan ke- k terhadap total pendapatan rumah tangga contoh (%)

X_{ki} = pendapatan dari sumber pendapatan ke- k dari rumah tangga ke- i

X_{ij} = pendapatan dari sumber pendapatan ke- j dari rumah tangga ke- i

$$\sum_{i=1}^n X_{ki} = \text{pendapatan dari sumber pendapatan ke-}k \text{ dari seluruh rumah tangga contoh}$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m X_{ij} = \text{total pendapatan (dari berbagai sumber pendapatan) dari seluruh rumah tangga contoh}$$

Untuk mengetahui distribusi pendapatan rumah tangga, digunakan suatu indeks sebagai ukuran ketimpangan, yaitu indeks Gini yang diformulasikan sebagai berikut (Glewwe, 1986; Adams *et al.*, 1995 dalam Susilowati *et al.*, 2010):

$$G(y) = \frac{2}{\bar{y}} \text{Cov}(y_i, p(y_i)) \quad (3)$$

- di mana:
- $G(y)$ = indeks Gini total pendapatan rumah tangga
 - \bar{y} = rata-rata pendapatan rumah tangga
 - y_i = total pendapatan rumah tangga ke- i
 - $p(y_i)$ = urutan pendapatan petani, yaitu $p = 1$ untuk urutan rumah tangga berpendapatan terendah dan $p = n$ untuk urutan rumah tangga berpendapatan tertinggi
 - n = jumlah populasi rumah tangga yang dianalisis

Nilai G berada pada selang 0 dan 1. Distribusi termasuk kategori timpang apabila nilai $G > 0,5$; kategori sedang bila $0,1 < G < 0,5$; dan kategori ketimpangan ringan apabila $G < 0,4$.

DINAMIKA PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Lahan merupakan aset utama bagi rumah tangga petani dan merupakan faktor produksi utama dalam usaha tani. Lahan berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga petani (dalam hal ini pendapatan dari usaha tani) lewat luasnya dan atau kesuburannya. Maksudnya, pada lahan dengan tingkat kesuburan tertentu pendapatan dari usaha tani akan semakin tinggi dengan semakin luasnya lahan garapan. Di sisi lain, pada luas lahan tertentu pendapatan dari usaha tani akan semakin tinggi dengan semakin tingginya tingkat kesuburan tanah yang bersangkutan (Purwoto *et al.*, 2011).

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum penguasaan lahan rumah tangga pada tipe lahan sawah berbasis padi cenderung menurun, bahkan di Sumut terjadi penurunan yang relatif besar dibandingkan wilayah lainnya, sedangkan di Sulsel cenderung meningkat (Tabel 2). Menurut Susilowati *et al.* (2010), penurunan terjadi pada lahan sawah dan lahan perkebunan. Penurunan luas total kepemilikan lahan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat penguasaan lahan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan, walaupun secara rata-rata tidak besar. Hal ini disebabkan adanya transaksi jual-beli, hibah, atau warisan. Peningkatan

penguasaan lahan di Sulsel disebabkan oleh adanya penambahan penguasaan pada lahan kebun.

Tabel 2. Dinamika Penguasaan Lahan Rumah Tangga Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007–2010

Provinsi	2007	2010	Pertumbuhan (%)
Jabar	1,558	1,518	-2,57
Jateng	0,856	0,834	-2,57
Jatim	0,731	0,729	-0,27
Sulsel	1,113	1,134	1,89
Sumut	1,150	0,945	-17,83

Pendapatan rumah tangga per tahun di desa Patanas dengan agroekosistem lahan sawah berbasis padi pada tahun 2007 berkisar Rp11,7 juta–Rp25,9 juta, dan pada tahun 2010 berkisar Rp26,2–Rp41,0 juta. Dengan demikian, dalam periode tiga tahun (2007–2010) pendapatan rumah tangga secara nominal di semua lokasi meningkat dengan laju peningkatan berkisar 58,40–163,33% (Tabel 3). Peningkatan terbesar terjadi di Sulsel dan terendah di Jabar. Dari kelima lokasi, laju peningkatan yang di bawah 100% terjadi di Jabar dan Sumut, sementara di ketiga provinsi lainnya di atas 100%.

Dinamika pendapatan dari sektor pertanian berkisar 35,44–109,98%. Peningkatan terbesar terjadi di Sulsel dan terendah di Jabar (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pendapatan dari pertanian masih dominan. Rendahnya peningkatan pendapatan pertanian di Jabar disebabkan oleh menurunnya kontribusi pendapatan dari kegiatan berburuh tani serta pertumbuhan pendapatan dari usaha pertanian berbasis lahan yang tidak begitu besar. Pada wilayah ini, usaha peternakan memberikan kontribusi peningkatan pendapatan yang cukup besar (Tabel 4). Tingginya peningkatan pendapatan pertanian di Sulsel disebabkan peningkatan pendapatan dari usaha peternakan dan atau perikanan yang relatif besar.

Peningkatan pendapatan nonpertanian lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan pertanian (123,42–450,28% vs. 35,44–109,98%). Menurut Susilowati *et al.* (2010), hal ini disebabkan petani harus mencari tambahan sumber penghasilan untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan dan harga-harga tersebut. Fenomena ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya sumber pendapatan dan semakin meningkatnya partisipasi kerja, terutama dari sektor nonpertanian. Dari Tabel 4 juga terlihat bahwa peningkatan pendapatan dari usaha nonpertanian sangat besar (3.000–19.000%), kecuali di Sulsel. Pendapatan dari kegiatan berburuh nonpertanian juga meningkat tajam, berkisar 146–1.400%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa di perdesaan semakin berkembang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di sektor nonpertanian.

Tabel 3. Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan (Nominal dan Riil) pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007–2010

Provinsi/Tahun	Pendapatan Rumah Tangga (Rp000)			Pendapatan Rumah Tangga (kg beras) ^a		
	Pertanian	Nonpertanian	Total	Pertanian	Nonpertanian	Total
Jabar						
2007	23.519	2.366	25.885	5.644	568	6.212
2010	31.853	9.149	41.002	5.899	1.694	7.593
r (%) ^b	35,44	286,64	58,40	4,51	198,36	22,23
Jateng						
2007	8.780	3.270	12.050	2.007	747	2.754
2010	16.023	10.236	26.260	3.205	2.047	5.252
r (%) ^b	82,49	213,05	117,92	59,68	173,92	90,68
Jatim						
2007	9.178	2.608	11.786	2.295	652	2.947
2010	18.447	8.879	27.326	3.689	1.776	5.465
r (%) ^b	100,98	240,50	131,85	60,79	172,40	85,48
Sulsel						
2007	10.888	2.024	12.913	2.722	506	3.228
2010	22.863	11.140	34.003	4.573	2.228	6.801
r (%) ^b	109,98	450,28	163,33	67,98	340,23	110,66
Sumut						
2007	14.084	2.328	16.412	2.683	443	3.126
2010	23.155	5.201	28.356	3.859	867	4.726
r (%) ^b	64,40	123,42	72,78	43,85	95,49	51,18

Keterangan:

^a Harga beras (Rp/kg) sebagai deflator: Jabar (2007: 4.167; 2010: 5.400), Jateng (2007: 4.375; 2010: 5.000); Jatim, Sulsel (2007: 4.000; 2010: 5.000) dan Sumut (2007: 5.250; 2010: 6.000);

^b r = pertumbuhan pada periode 2007–2010

Pendapatan rumah tangga riil (setara beras) juga meningkat, meskipun peningkatannya tidak sebesar peningkatan pendapatan nominal (Tabel 4). Pada periode 2007–2010, pendapatan rumah tangga setara beras meningkat berkisar 22,23–110,66%. Peningkatan terendah terjadi di Jabar. Meskipun demikian, pendapatan di Jabar paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Lebih lanjut terlihat bahwa pendapatan rumah tangga setara beras di Jabar relatif tetap (meningkat 4,5% dalam tiga tahun).

Tabel 4. Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Perdesaaan pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi Menurut Sumber Pendapatan, 2007–2010

Pro- vinsi/ Tahun	Sumber Pendapatan (Rp000)								Total
	Pertanian berbasis lahan	Peter- nakan/ perikanan	Buruh perta- nian	Total perta- nian	Usaha nonper- tanian	Buruh nonper- tanian	Lain- lain	Total nonper- tanian	
Jabar									
2007	22.196	456	867	23.519	232	291	1.844	2.366	25.885
2010	29.207	3.821	475	31.853	5.376	3.452	320	9.149	41.002
r (%) ^a	31,59	738,35	(45,19)	35,44	2.222	1.088	(82,65)	286,64	58,40
Jateng									
2007	7.925	265	591	8.780	16	1.254	2.000	3.270	12.050
2010	12.407	2.360	1.347	16.023	3.119	5.427	1.690	10.236	26.260
r (%) ^a	56,56	790,84	128,06	82,49	19.394	332,73	(15,49)	213,05	117,92
Jatim									
2007	7.674	878	626	9.178	68	1.866	674	2.608	11.786
2010	17.052	892	629	18.447	2.134	6.746	-	8.879	27.326
r (%) ^a	122,20	1,61	0,55	100,98	3.046	261,51	(100,00)	240,50	131,85
Sulsel									
2007	9.892	378	619	10.888	296	663	1.065	2.024	12.913
2010	17.976	9.237	217	22.863	964	10.176	-	11.140	34.003
r (%) ^a	81,73	2.345	(64,94)	109,98	225,31	1.435	(100,00)	450,28	163,33
Sumut									
2007	12.706	402	976	14.084	56	1.194	1.078	2.328	16.412
2010	21.496	823	1.154	23.155	2.255	2.946	-	5.201	28.356
r (%) ^a	69,18	104,40	18,27	64,40	3.936	146,71	(100,00)	123,42	72,78

Keterangan:

^ar = pertumbuhan pada periode 2007–2010

DINAMIKA STRUKTUR PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Secara nasional, pangsa PDB sektor pertanian terhadap PDB total cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun, struktur pendapatan pada rumah tangga pertanian sangat berbeda dengan struktur pendapatan nasional. Hasil penelitian Lokollo *et al.* (2007) dan BPS (2014) yang menggunakan data seri Sensus Pertanian 1983–2003 dan 2003–2013 menunjukkan bahwa pangsa sektor pertanian dalam pendapatan rumah tangga masih relatif besar dan cenderung meningkat.

Hasil penelitian Patanas di perdesaaan sawah berbasis padi pada periode 2007–2010 menunjukkan bahwa pangsa pendapatan dari kegiatan pertanian masih tinggi namun ada kecenderungan menurun (Tabel 5). Pada tahun 2007 pangsa pendapatan pertanian terhadap pendapatan total rumah tangga berkisar 72,86–

Tabel 5. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007 dan 2010 (%)

Sumber Pendapatan	Jabar		Jateng		Jatim		Sulsel		Sumut	
	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010
Usaha pertanian berbasis lahan	85,75	71,23	65,76	47,25	65,11	62,40	76,60	52,87	77,42	75,81
Peternakan dan perikanan	1,76	9,31	2,20	8,99	7,45	3,27	2,93	27,17	2,45	2,90
Buruh pertanian	3,35	1,16	4,90	5,13	5,31	2,30	4,79	0,64	5,95	4,07
Pertanian	90,86	77,69	72,86	61,02	77,87	67,51	84,32	67,24	85,82	81,66
Usaha nonpertanian	0,90	13,11	0,13	11,88	0,58	7,81	2,29	2,84	0,34	7,95
Buruh nonpertanian	1,22	8,42	10,41	20,67	15,83	24,69	5,13	29,93	7,28	10,39
Lain-lain	7,12	0,78	16,60	6,44	5,72	-	8,24	-	6,57	-
Nonpertanian	9,14	22,31	27,14	38,98	22,13	32,49	15,68	32,76	14,18	18,34
Total (Rp000)	25.885	41.002	12.050	26.260	11.786	27.326	12.913	34.003	16.412	28.356

90,86%, terendah di Jawa Tengah dan tertinggi di Jabar. Pada tahun 2010 pangsa pendapatan pertanian berkisar 61,02–81,66%, terendah masih di Jawa Tengah dan tertinggi di Sumut. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika struktur pendapatan berbeda antarwilayah. Pertumbuhan pendapatan nonpertanian di Jabar dan Sulsel cukup tinggi sehingga pangsa pendapatan pertanian menurun lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, terutama Sumut yang penurunannya relatif kecil.

Apabila pendapatan pertanian diperinci menjadi pendapatan dari usaha pertanian berbasis lahan, peternakan, dan perikanan, serta buruh pertanian, terlihat bahwa struktur pendapatan didominasi oleh usaha pertanian berbasis lahan yang pada tahun 2007 berkisar 65–85%. Pada tahun 2010 terjadi pergeseran antarwilayah pangsa usaha pertanian berbasis lahan cenderung menurun, berkisar 47–75%. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya pendapatan dari peternakan dan perikanan, serta dari nonpertanian.

Pangsa pendapatan dari peternakan dan perikanan cenderung meningkat, kecuali di Jatim. Pangsa pendapatan dari buruh tani cenderung menurun, kecuali di Jateng yang relatif tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang mau bekerja di sektor pertanian semakin sedikit. Atau dengan kata lain, kegiatan buruh di sektor pertanian kurang menarik, terutama pada tenaga kerja muda. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi secara umum, yaitu terjadi *farmer aging* di sektor pertanian.

Pangsa pendapatan nonpertanian cenderung meningkat dengan peningkatan berkisar 4–17%, terendah di Sumut dan tertinggi di Sulsel. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya pangsa usaha nonpertanian dan buruh nonpertanian. Peningkatan pangsa usaha nonpertanian berkisar 7,6–12,2%, kecuali di Sulsel yang relatif tetap. Pangsa pendapatan buruh nonpertanian meningkat 3,1–24,8%, tertinggi di Sulsel dan terendah di Sumut. Hal ini berlawanan dengan fenomena kegiatan buruh pertanian yang pangasanya semakin mengecil. Temuan ini mempertegas bahwa kegiatan pertanian kurang menarik lagi bagi tenaga kerja perdesaaan.

DINAMIKA DISTRIBUSI PENDAPATAN

Ketimpangan pendapatan selain disebabkan perbedaan jenis komoditas, juga disebabkan perbedaan adopsi teknologi pada komoditas yang sama dan munculnya kegiatan nonpertanian. Hal ini terlihat dari hasil penelitian Supriyati *et al.* (2004), ketimpangan pendapatan pada wilayah berbasis padi bervariasi. Indeks Gini pendapatan di perdesaan Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat masing-masing 0,60, 0,45, dan 0,8. Fenomena ketimpangan pendapatan di Jawa lebih tinggi dari luar Jawa juga dikemukakan oleh Rachman dan Supriyati (2005) dan Adnyana *et al.* (2000). Lebih lanjut, Rachman dan Supriyati (2005) menyatakan bahwa masuknya kegiatan nonpertanian memperburuk distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan tahun 2000–2007 dari 119 negara di dunia bervariasi, dengan indeks Gini berkisar 25–64,3 (World Bank, 2009). Dari 119 negara yang termasuk kategori ketimpangan ringan sebanyak 61 negara, Indonesia termasuk

dalam kategori ini pada urutan ke-58. Sementara itu, yang termasuk kategori ketimpangan sedang dan berat masing-masing 37 dan 21 negara. Data ketimpangan pendapatan tahun 2008 dari 134 negara di dunia tidak berbeda jauh, dengan indeks Gini berkisar 23–70,7 (CIA, 2008). Jumlah negara dengan kategori ketimpangan ringan, sedang, dan berat masing-masing 71, 37, dan 28 negara. Indeks Gini Indonesia sebesar 36,3, pada posisi ke-54 dari 71 negara yang termasuk kategori ketimpangan ringan.

Hasil kajian di perdesaaan sawah berbasis padi menunjukkan bahwa distribusi pendapatan pada tahun 2007 dan 2010 pada kategori ketimpangan sedang dalam kisaran 0,43–0,52 dan 0,42–0,50 (Tabel 6). Meskipun indeks Gini di Sumut dan Jateng di atas 0,5, namun masih dapat dikatakan dalam kategori sedang. Dalam periode tersebut ada kecenderungan distribusi pendapatan rumah tangga semakin merata, diindikasikan dengan menurunnya indeks Gini, kecuali di Jawa Timur yang meningkat (namun masih dalam kategori ketimpangan sedang).

Distribusi pendapatan yang terjadi disebabkan karena perbedaan penguasaan aset lahan, ketersediaan tenaga kerja, serta kesempatan kerja dan berusaha nonpertanian. Penguasaan lahan yang berbeda disebabkan rancangan rumah tangga contoh secara sengaja mengambil petani yang tidak mempunyai lahan (buruh tani), petani sempit, dan petani luas. Namun demikian, dengan adanya stratifikasi rumah tangga contoh yang merupakan representasi suatu desa menunjukkan bahwa kesempatan kerja dan berusaha di sektor pertanian dan nonpertanian saling melengkapi.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya disebabkan perbedaan lokasi penelitian. Lokasi contoh penelitian PSEKP sebenarnya relatif kecil untuk dijadikan agregasi tingkat provinsi, apalagi wilayah Jawa dan luar Jawa.

Tabel 6. Dinamika Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Perdesaaan pada Agroekosistem Lahan Sawah Berbasis Padi, 2007–2010

Provinsi	2007	2010
Jabar	0,49	0,47
Jateng	0,52	0,50
Jatim	0,43	0,44
Sulsel	0,46	0,46
Sumut	0,51	0,42

KESIMPULAN

Dalam periode 2007–2010, pendapatan rumah tangga perdesaaan baik nominal maupun riil meningkat, laju peningkatan pendapatan dari nonpertanian lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pertanian. Pendapatan rumah tangga yang sudah relatif tinggi pada tahun 2007 meningkat lebih rendah dibandingkan yang lainnya.

Struktur pendapatan rumah tangga bervariasi antarwilayah. Struktur pendapatan rumah tangga masih didominasi oleh pendapatan dari pertanian, terutama dari usaha pertanian berbasis lahan, namun ada kecenderungan menurun. Hal ini mengindikasikan semakin berkembangnya kesempatan kerja dan berusaha nonpertanian di perdesaan sawah berbasis padi. Menurunnya pangsa berburuh pertanian dan meningkatnya pangsa berburuh nonpertanian mengindikasikan bahwa sektor pertanian kurang diminati oleh tenaga kerja perdesaan. Di sisi lain, distribusi pendapatan di perdesaan sawah berbasis padi dalam kategori sedang, dan dalam tiga tahun berikutnya ada kecenderungan menurun.

Untuk meningkatkan pendapatan dari kegiatan pertanian diperlukan dukungan teknologi untuk peningkatan produktivitas, serta harga yang memberikan keuntungan bagi petani. Di samping itu, diperlukan upaya memperluas luas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di kegiatan nonpertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014a. Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013. Berita Statistik No. 54/07/ Th. XVII, 1 Juli 2014. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014b. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [CIA] Central Intelligence Agency. 2008. World Factbook 2008. http://www.photius.com/rankings/economy/distributionof_family_income_gini_index_2008_0.html (25 Januari 2010).
- Adnyana, M.O., Sumaryanto, M. Rachmat, R. Kustiari, S.H. Susilowati, Supriyati, E. Suryani, dan Soeprapto. 2000. Assessing the Rural Development Impact of the Crisis in Indonesia. Center for Agro-socioeconomic Research, Bogor and the World Bank, Washington, DC, USA.
- Irawan, B., P. Simatupang, R. Kustiari, Sugiarto, Supadi, J.F. Sinuraya, M. Iqbal, M.Ariani, V Darwis, R. Elizabeth, Sunarsih, C. Muslim, T.B. Purwantini, dan T. Nurasa. 2007. Panel Petani Nasional (Patanas) Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Laporan Penelitian. Pusat Analisis dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Lokollo, E., IW. Rusastra, H.P. Saliem, Supriyati, S. Friyatno, G.S. Budhi. 2007. Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan: Analisis Perbandingan Antarsensus Pertanian. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Purwoto, A., IW. Rusastra, A.K. Zakaria, B. Winarso, T.B. Purwantini, D. Hidayat, T. Nurasa, C. Muslim, C.R. Adawiyah. 2011. Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Sayuran dan Palawija. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rachman, H.P.S. dan Supriyati. 2005. Struktur dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Lahan Sawah di Jawa dan Luar Jawa. *Soca* 2(2):1–20.

- Sajogyo. 1990. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan dalam Rangka Industrialisasi. *Dalam* Sajogyo dan M. Tambunan (Eds.). *Industrialisasi Perdesaan*. Sekindo Eka Jaya. Jakarta.
- Supriyati, Saptana, dan Y. Supriyatna. 2003. Hubungan Penguasaan Lahan dan Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan. *Soca* 3(2):1–22.
- Susilowati, S.H., B. Hutabarat, M. Rachmat, A. Purwoto, Sugiarto, Supriyati, Supadi, A.K. Zakaria, B. Winarso, H. Supriadi, T.B. Purwantini, R. Elizabeth, D. Hidayat, T. Nurasa, C. Muslim, M. Maulana, M. Iqbal, dan R. Aldillah. 2010. *Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani dan Usahatani Padi*. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- World Bank. 2009. 2009 World Development Indicators Online. The World Bank. Washington, DC. <http://go.worldbank.org/U0FSM7AQ40> (25 Januari 2010).